

Pengaruh Upah Minimum Terhadap Gaji, Jumlah Pekerja, dan Inflasi di Indonesia



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi**

**Oleh:
Gina Aninditha
2016110007**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN
Terakreditasi Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1759/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2020**

The Effect of Minimum Wages on Salaries, Number of Workers, and Inflation in Indonesia



UNDERGRADUATE THESIS

**Submitted to complete part of the requirements for
Bachelor Degree in Economics**

**By
Gina Aninditha
2016110007**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN DEVELOPMENT ECONOMICS
Accredited by National Accreditation Agency No. 1759/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2020**

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN



PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH UPAH MINIMUM TERHADAP GAJI,
JUMLAH PEKERJA DAN INFLASI DI INDONESIA**

Oleh:
Gina Aninditha
2016110007

Bandung, Februari 2021

Ketua Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan,

Ivanta Mokoginta

Ivantia S. Mokoginta. Ph.D.

Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yanuarita", written over a horizontal line.

Yanuarita Hendrani, Dra., M.A., Ph.D

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama (*sesuai akte lahir*) : Gina Aninditha
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 9 April 1998
Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) : 2016110007
Program studi : Manajemen / Akuntansi **Ekonomi Pembangunan**
Jenis Naskah : Skripsi

judul :

PENGARUH UPAH MINIMUM TERHADAP GAJI, JUMLAH PEKERJA DAN INFLASI DI INDONESIA

dengan,

Pembimbing : Yanuarita Hendrani, Dra., M.a., Ph.D.

MENYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri

1. Apapun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sedur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta atau yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No 20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya
Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta

Bandung,

Dinyatakan tanggal : 6 Februari 2020

Pembuat Pernyataan :



GINA ANINDITHA

ABSTRAK

Tingkat Upah Minimum di setiap Provinsi berbeda karena adanya perbedaan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di setiap provinsi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap tingkat gaji, jumlah tenaga kerja, dan inflasi di Provinsi Miskin dan Provinsi kaya di Indonesia. Tahun yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2009 - 2017. Metode yang digunakan adalah Panel Least Square (PLS). Hasil estimasi menggunakan Panel Least Square menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara upah minimum dengan tingkat gaji dan jumlah tenaga kerja. Hubungan negatif ditunjukkan antara upah dengan tingkat inflasi. Hal tersebut terjadi di Provinsi Kaya dan Provinsi Miskin.

Kata Kunci : *Upah Minimum, Gaji, Jumlah tenaga kerja, Inflasi, PLS (Panel Least Square)*

ABSTRACT

The Minimum Wage Level in each Province is different. The difference in the Minimum Wage Level is due to differences in the necessities of Decent Living (KHL) in each province. This study aims to see the effect of the Provincial Minimum Wage on the level of salary, number of workers, and inflation in Poor Provinces and Rich Provinces in Indonesia. The years used in this research are 2009 - 2017. The method used is the Panel Least Square (PLS). The estimation results using Panel Least Square show that there is a positive relationship between the minimum wage and the salary level and the number of workers. The negative relationship is found between wages and the inflation rate. This happened in Rich Provinces and Poor Provinces.

Keywords: *Minimum Wage, Salary, Number of Workers, Inflation, PLS (Least Square Panel)*

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Skripsi yang ditulis dengan judul “Pengaruh Upah Minimum terhadap gaji, jumlah pekerja, dan inflasi di Indonesia” diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Penulis juga menyadari banyak sekali kekurangan dalam skripsi ini sehingga diperlukan kritik dan saran yang membangun yang berguna untuk penelitian di masa yang akan mendatang.

Dalam penulisan skripsi ini banyak sekali tantangan dan hambatan yang dihadapi dari masa persiapan penulisan skripsi hingga proses penulisan skripsi ini selesai. Namun banyaknya pihak yang memotivasi dan memberi dukungan yang di dapat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya Bapak Firjadi Putra dan Ibu Sri Supiati terimakasih buat segala dukungannya baik secara materil maupun non-materil. Selain itu, saya juga mengucapkan terimakasih kepada kakak dan kembaran saya terimakasih untuk segala supportnya.
2. Ibu Yanuarita Hendrani, Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih atas bimbingan, ilmu, perhatian, waktu, dan kesabaran selama penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat berjalan lancar dan selesai tepat pada waktunya. Terimakasih juga kepada Ibu Noknik Karliya H, Dra., MP. selaku dosen wali. Terimakasih atas kesabarannya dimana pada masa kuliah seringkali penulis merepotkan dan terimakasih telah memberikan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan maupun saat penulis menyelesaikan skripsi ini sehingga semua dapat diselesaikan tepat waktu.
3. Kepada Ibu Ivantia S. Mokoginta, Ph.D selaku ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan banyak pelajaran dan bimbingan berharga khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi ekonomi pembangunan.
4. Dosen-dosen Ekonomi Pembangunan UNPAR: Ibu Dr. Miryam L. Wijaya, Ibu Noknik Karliya H, Dra., MP., Ibu Hilda Leilani Masniaritta Pohan, Ph.D., Ibu Siwi Nugraheni, Dra., M.Env., Bpk Dian Fordian, S.E., M.Si, Bpk Ishak Somantri, Drs., MSP., Bpk Charvin Lim, S.E., M.Sc., Bpk Aswin Masudi, S.E., M.S.E. Terimakasih atas segala ilmu dan pembelajaran yang telah diberikan kepada

penulis, tidak hanya dalam materi namun juga dalam pembangunan karakter

5. Kepada sahabat-sahabat penulis yaitu Bila, Rere, Rina, Alya, Feren, Nadia Restu, Venny, Eva, dan Sisi. Terimakasih atas segala cerita, canda, tangis, tawa yang membuat masa perkuliahan menjadi lebih indah dan penuh warna.
6. Kepada teman teman seperjuangan EIP yaitu Dinda, Nadia, dan Zahrah. Terimakasih sudah menjadi teman diskusi dan bertukar pikiran selama di kajian EIP
7. Kepada sahabat-sahabat saya semasa SD hingga SMA yaitu Ami, Asta, Bila, Chica yang selalu memberikan motivasi untuk bisa lulus dan sukses bersama meskipun kita semua beda-beda daerah kuliahnya.
8. Kepada teman dan keluarga EP 2016 lainnya yaitu Nadia Giovanni, Disma, Dinda, Ferinda, Nia, Zahra, Ita, Debora, Difa, Rio Eva, Sisi. Terimakasih atas segala canda tawanya selama masa perkuliahan.
9. Berbagai pihak yang telah mendukung selama masa perkuliahan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Bandung, 5 Februari 2021

Gina Aninditha

DAFTAR ISI

ABSTRAK	III
ABSTRACT.....	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI.....	VII
DAFTAR GAMBAR	IX
DAFTAR TABEL	X
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	6
1.3 TUJUAN.....	7
1.4 KERANGKA PEMIKIRAN.....	7
BAB 2.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 <i>Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja</i>	10
2.2 <i>Keseimbangan Pasar Tenaga kerja</i>	11
2.3 <i>TEORI UPAH MINIMUM</i>	14
2.4 <i>DAMPAK UPAH MINIMUM DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA</i>	15
2.5 <i>COST PUSH INFLATION</i>	16
2.6 <i>PENELITIAN TERDAHULU</i>	17
BAB 3.....	20
METODE DAN OBJEK PENELITIAN	20
3.1 <i>METODE PENELITIAN</i>	20
3.2. <i>DATA DAN SUMBER DATA</i>	20
3.3. <i>MODEL PENELITIAN DAN TEKNIK ANALISIS</i>	21
3.3.1 <i>Model Penelitian</i>	21
3.3.2 <i>Teknik Analisis</i>	23
3.4.1 <i>OBJEK PENELITIAN</i>	26
3.4.2 <i>Deskripsi Objek Penelitian</i>	26
3.4.3 <i>Upah Minimum</i>	28
3.4.4 <i>Pengangguran</i>	29
3.4.5 <i>Jam Kerja</i>	30
3.4.6 <i>INFLASI</i>	31
3.4.7 <i>Gaji</i>	32
3.6.7. <i>Produktivitas</i>	33
BAB 4.....	35
HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1 <i>IDENTIFIKASI MODEL</i>	35
4.1.2 <i>Uji Asumsi Klasik - Heteroskedastisitas</i>	41
4.1.3. <i>Uji Asumsi Klasik - Multikolinearitas</i>	44

4.1.4 Hasil Estimasi	45
BAB 5.....	56
PENUTUP.....	56
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	A
LAMPIRAN 1. UJI CHOW	A
LAMPIRAN 2. UJI HAUSMAN.....	C
LAMPIRAN 3. UJI LAGRANGE MULTIPLIER.....	D
LAMPIRAN 4. UJI HETEROSKEDASTISITAS	E
LAMPIRAN 4. UJI MULTIKOLINEARITAS	M
LAMPIRAN 5. HASIL REGRESI	N
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	R

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. KERANGKA PEMIKIRAN	9
GAMBAR 2. GRAFIK PERMINTAAN DAN PENAWARAN TENAGA KERJA.....	10
GAMBAR 3. GRAFIK KESEIMBANGAN PASAR TENAGA KERJA.....	11
GAMBAR 3. GRAFIK PERGESERAN PERMINTAAN DAN PENAWARAN TENAGA KERJA.....	13
GAMBAR 4. DAMPAK UPAH MINIMUM.....	15
GAMBAR 5. <i>COST PUSH INFLATION</i>	17
GAMBAR 6. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PERKAPITA.....	27
GAMBAR 7. RATA RATA NILAI UPAH MINIMUM DI PROVINSI KAYA DAN PROVINSI MISKIN	29
GAMBAR 8. RATA RATA JUMLAH PENGANGGURAN DI PROVINSI KAYA DAN PROVINSI MISKIN	30
GAMBAR 9. RATA RATA JUMLAH JAM KERJA DI PROVINSI KAYA DAN PROVINSI MISKIN	31
GAMBAR 10. RATA RATA TINGKAT INFLASI DI PROVINSI KAYA DAN PROVINSI MISKIN	32
GAMBAR 11. RATA RATA TINGKAT GAJI DI PROVINSI KAYA DAN PROVINSI MISKIN.....	33
GAMBAR 12. RATA RATA NILAI PRODUKTIVITAS DI PROVINSI KAYA DAN PROVINSI MISKIN	34

DAFTAR TABEL

TABEL 1. DATA DAN SUMBER DATA.....	21
TABEL 2. CHOW TEST PROVINSI KAYA	36
TABEL 3. CHOW TEST PROVINSI MISKIN	37
TABEL 4. TEST UJI HAUSMAN PROVINSI KAYA	38
TABEL 5. UJI HAUSMAN PROVINSI MISKIN	38
TABEL 6. UJI TEST LAGRANGE MULTIPLIER EMPLOYMENT EFFECT JUMLAH JAM KERJA PROVINSI KAYA	39
TABEL 7. UJI TEST LAGRANGE MULTIPLIER PROVINSI MISKIN	40
TABEL 8. HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS WAGE EFFECT	41
TABEL 9. HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS EMPLOYMENT EFFECT	41
TABEL 10. HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS PRICE EFFECT.....	41
TABEL 11. HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS WAGE EFFECT	42
TABEL 12. HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS EMPLOYMENT EFFECT	42
TABEL 13. HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS PRICE EFFECT.....	43
TABEL 14. HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS WAGE EFFECT	44
TABEL 15. HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS EMPLOYMENT EFFECT	44
TABEL 16. HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS PRICE EFFECT	44
TABEL 17. HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS WAGE EFFECT	45
TABEL 18. HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS EMPLOYMENT EFFECT	45

TABEL 19. HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS PRICE EFFECT	45
TABEL 20. HASIL ESTIMASI WAGE EFFECT PROVINSI KAYA.....	46
TABEL 21. HASIL ESTIMASI WAGE EFFECT PROVINSI MISKIN	46
TABEL 22. HASIL ESTIMASI EMPLOYMENT EFFECT JUMLAH PENGANGGURAN PROVINSI KAYA	47
TABEL 23. HASIL ESTIMASI EMPLOYMENT EFFECT JUMLAH PENGANGGURAN PROVINSI MISKIN	47
TABEL 24. HASIL ESTIMASI EMPLOYMENT EFFECT JAM KERJA PROVINSI KAYA.....	48
TABEL 25. HASIL ESTIMASI EMPLOYMENT EFFECT JAM KERJA PROVINSI MISKIN.....	48
TABEL 26. HASIL ESTIMASI PRICE EFFECT PROVINSI KAYA.....	49
TABEL 27. HASIL ESTIMASI PRICE EFFECT PROVINSI MISKIN	49

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seluruh negara berkembang memiliki masalah tenaga kerja termasuk di Indonesia, antara lain karena kondisi pasar tenaga kerja yang kurang fleksibel, dalam arti bahwa kurang dapat beradaptasi dengan cepat ketika masalah penawaran dan permintaan tenaga kerja terjadi atau ketika siklus bisnis beralih ke resesi. Pasar tenaga kerja yang fleksibel sangat berperan penting untuk mendukung majunya perekonomian dalam suatu negara. (Rajeev, 2009). Keadaan pasar tenaga kerja di Indonesia yang dualistik dengan penawaran tenaga kerja yang banyak dan mutu angkatan kerja yang rendah di satu sisi menyebabkan upah menjadi isu utama dalam ketenagakerjaan. Kebijakan pengupahan yang ada di Indonesia bertumpu pada upah minimum yang disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). (ILO, 2012).

Dalam sistem pengupahan dikenal istilah upah minimum, yaitu standar minimum yang digunakan oleh pengusaha atau perusahaan untuk memberikan upah kepada para pekerjanya yang berada di lingkungan usaha atau kerjanya. Karena setiap provinsi memiliki pemenuhan kebutuhan hidup layak yang berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Regional (Bambang, 2013, p. 213). Di Indonesia, masing-masing provinsi menetapkan upah minimum yang berbeda-beda karena Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di setiap provinsi berbeda-beda. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh daya beli dan inflasi di daerah tersebut, Penetapan upah minimum setiap provinsi juga. (Kumparan, 2018). Tujuan diberlakukannya upah minimum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pengusaha dalam memberikan upah kepada para pekerja. Hal ini sangat bisa terjadi ketika pekerja memiliki sedikit daya tawar. Peningkatan upah minimum setiap tahunnya diharapkan dapat berdampak terhadap kehidupan yang lebih baik untuk para pekerjanya.

Pada tahun 2017, Badan Pusat Statistika (BPS) mencatat terdapat beberapa provinsi yang mengalami kenaikan upah minimum cukup tinggi dari tahun sebelumnya yaitu provinsi Aceh menetapkan upah minimum provinsi 2017 sebesar Rp 2.500.000, atau naik sebesar 18 persen dari UMP 2016 yang sebesar Rp 2.118.500. Kemudian, Provinsi Maluku Utara menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 1.975.000, atau naik 17,4 persen dari UMP 2016 yang sebesar Rp 1.681.266. Sedangkan ada beberapa provinsi yang menetapkan kenaikan upah minimum cukup rendah dari tahun sebelumnya Yogyakarta, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 1.337.645, atau naik sebesar 8% dari

UMP 2016 yang sebesar Rp 1.237.700, kemudian Jawa Timur, menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 1.388.000, atau naik sebesar 8,9% dari UMP 2016 yang sebesar Rp 1.273.490. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berbeda beda tergantung pada kondisi inflasi dan juga pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) setiap provinsi. (Detik, 2017).

Struktur dan ciri pasar tenaga kerja di Indonesia memiliki ciri khas negara berkembang dengan penghasilan rendah. Sebagian penduduk Indonesia yang sedang bekerja, bekerja melalui sektor formal dan mendapatkan gaji sesuai dengan peraturan pengupahan di Indonesia, sedangkan yang lain nya bekerja di sektor informal. Dalam persaingan pasar, ketika terjadi kenaikan upah minimum perusahaan terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja nya untuk meminimalkan biaya produksi, sehingga pekerja yang sebelumnya bekerja di sektor formal berpindah ke sektor informal. (Bird, 2008). Dampak upah minimum terhadap pekerja juga perlu dilihat dari sisi mikro atau sisi perusahaan. Dampak kenaikan upah minimum terhadap permintaan tenaga kerja juga harus dilihat dari elastisitas permintaan tenaga kerja dengan substitusi antara faktor produksi. Semakin besar elastisitas substitusi permintaan tenaga kerja dengan mesin maka semakin besar elastisitas permintaan tenaga kerja. Tenaga kerja yang kurang terampil sangat mudah disubstitusi dengan penggunaan mesin dibandingkan dengan tenaga kerja yang terampil. Tenaga kerja yang tidak terampil cenderung lebih elastis, artinya ketika terjadi kenaikan upah minimum meskipun dalam jumlah sedikit akan menurunkan permintaan tenaga kerja yang tidak terampil dalam skala besar. (Sholeh M. , 2005).

Ketika terjadi kenaikan Upah Minimum Provinsi perusahaan dapat merespon dengan menurunkan jumlah permintaan tenaga kerja yang artinya angka pengangguran bertambah. Tingkat pengangguran yang tinggi biasanya terjadi di daerah atau provinsi yang memiliki upah minimum cukup tinggi, seperti Provinsi Papua menetapkan upah minimum provinsi 2017 sebesar Rp 2.663.646, atau naik sebesar 9,3 persen dari UMP 2016 yang sebesar Rp 2.435.000, maka angka pengangguran di Provinsi Papua juga bertambah sebanyak 8,5%. Sedangkan di DKI Jakarta karena kenaikan tidak setinggi di Provinsi Papua yaitu kenaikan UMP dari tahun 2016 ke tahun 2017 hanya sebesar 8.6%. Peningkatan jumlah pengangguran tidak sebesar di Provinsi Papua yaitu sebesar 7.6%

Angka pengangguran yang tinggi juga bisa disebabkan oleh adanya urbanisasi. Seseorang melakukan urbanisasi karena merasa upah yang didapatkan terlalu rendah atau lapangan pekerjaan yang tersedia di provinsi tersebut terbatas maka ia akan pindah mencari pekerjaan lain ke kota. Sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia

dan juga kualitas SDM yang dimiliki tidak dapat bersaing dengan para pekerja lain akan mengakibatkan peningkatan angka pengangguran, biasanya terjadi di pusat perekonomian seperti pulau jawa (Kompas, 2019). Menurut Mankiw (2006) salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pengangguran adalah adanya penetapan upah. Semakin tinggi upah yang ditetapkan dalam suatu negara maupun daerah maka tingkat pengangguran di negara maupun daerah tersebut juga akan semakin tinggi. (Bruce E. Kaufman, 1999).

Kenaikan upah minimum juga akan mempengaruhi pekerja dari sisi jam kerja, ketika terjadi kenaikan upah minimum perusahaan terkadang tidak akan mengurangi jumlah pekerja mereka tetapi perusahaan akan mengurangi jam kerja bagi pekerja yang dibayar sesuai dengan upah minimum, hal tersebut dinilai lebih baik dibandingkan harus mengurangi jumlah pekerja, yang pada akhirnya akan menaikkan jumlah pengangguran. (Neumark, 2006). Perusahaan jauh lebih memilih mengubah jam kerja setiap pekerja sebagai respon terhadap kenaikan upah minimum dibandingkan harus memecat karyawan dalam jangka pendek, sehingga pekerja yang diberikan upah lebih tinggi karena kenaikan upah minimum akan memiliki jam kerja lebih sedikit tetapi perusahaan akan menambah beban kerja setiap pekerja nya. (Wysocki, 1997).

Kenaikan Upah minimum juga berpengaruh terhadap kenaikan gaji setiap pekerja. Kenaikan gaji tidak hanya bagi pekerja yang dibayar sesuai dengan upah minimum provinsi yang ditetapkan seperti mereka yang masih muda, berpendidikan rendah, atau pekerja migran. Kenaikan gaji dikarenakan adanya kenaikan upah minimum juga dapat menaikkan gaji pekerja yang lebih terampil dan berpengalaman yang dibayar diatas upah minimum. (ILO, 2012). Semakin tinggi Upah Minimum yang ditetapkan pada suatu provinsi maka akan berdampak juga kepada tingginya gaji di provinsi tersebut, seperti misalnya antara Papua dengan Jawa tengah. Upah minimum yang ditetapkan di Provinsi Papua pada tahun 2017 sebesar Rp 2663646 masih lebih tinggi dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 sebesar Rp 1388000, maka gaji di Provinsi Papua akan lebih tinggi dibandingkan di Provinsi Jawa Tengah. Tingginya gaji yang diberikan juga sesuai dengan kondisi provinsi tersebut dimana di Provinsi Papua akses barang kebutuhan masyarakat jauh lebih sulit dibandingkan dengan di Pulau jawa. Hal ini membuat harga barang-barang menjadi lebih mahal dibandingkan di kawasan Indonesia bagian barat. (Liputan6, 2016).

Bukan hanya mempengaruhi sisi pekerja dan juga gaji, kenaikan upah minimum juga bisa memicu terjadinya inflasi. Hal ini dikarenakan, ketika terjadi

kenaikan upah minimum di setiap provinsi, maka perusahaan akan merespon dengan cara mengurangi jumlah lapangan pekerjaan atau dengan menaikkan biaya produksi yang nantinya akan diikuti dengan naiknya harga barang yang dijual, untuk menutupi kenaikan upah minimum. (Lemos, 2004). Hal ini menyebabkan kenaikan harga barang di pasar yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi (*Cost Push Inflation*). Di sisi lain, kenaikan upah minimum akan berdampak pada naiknya pendapatan yang diterima oleh para pekerja, maka konsumsi para pekerja juga akan bertambah. Ketika konsumsi para pekerja bertambah maka akan meningkatkan permintaan pasar. Kenaikan permintaan akan suatu barang apabila tidak diikuti dengan naiknya jumlah penawaran, akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa (*Demand pull Inflation*). (Sholeh M. , 2005). Phillips dalam Mankiw (2006) juga menjelaskan hubungan antara upah dengan tingkat pengangguran memiliki hubungan negatif. Sesuai dengan teori permintaan, ketika permintaan naik maka harga juga akan naik, sehingga produsen akan meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah jumlah pekerja. Ketika jumlah pekerja yang diminta bertambah maka tingkat pengangguran akan berkurang.

Laporan dari World Bank (2016) melihat bahwa kecenderungan kesejahteraan yang terjadi di Indonesia terbagi, baik dari segi vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, ketimpangan pendapatan Indonesia semakin terlihat dikarenakan ekonomi Indonesia yang terus tumbuh dengan trend yang positif di tengah lambatnya perekonomian dunia. Hal ini, menjelaskan pendapatan tersebut hanya dirasakan oleh masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi. Sedangkan, secara horizontal masyarakat yang hidup di Indonesia bagian barat memiliki taraf hidup yang jauh lebih layak dibandingkan dengan masyarakat Indonesia di bagian timur.

Menurut Numark & Watcher (2006) perbedaan pendapatan antar wilayah atau antar provinsi bisa diatasi dengan penerapan upah minimum. Penerapan upah minimum diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Di sisi lain, penerapan upah minimum di Indonesia mengakibatkan tingginya angka pengangguran terutama bagi provinsi yang menerapkan upah minimum terlalu tinggi, dan juga dapat memicu terjadinya inflasi. (Ekonomi Bisnis, 2019)

Peningkatan upah minimum yang terlalu tinggi bisa menyebabkan surplus tenaga kerja pada suatu provinsi meningkat. Surplus ini akan menekan ke sektor lainnya atau bahkan bisa menyebar ke daerah lainnya. Karena adanya hubungan saling terkait antar sektor dalam sebuah perekonomian, maka kenaikan upah minimum juga berdampak pada perekonomian suatu provinsi, seperti pendapatan provinsi,

kesempatan kerja dan juga jumlah produksi. Kenaikan upah minimum memiliki dampak langsung dan juga tidak langsung. Dampak langsung yang dapat dirasakan dari sisi pekerja adalah naiknya pendapatan pekerja sedangkan dari sisi perusahaan adalah naiknya biaya produksi. Kemudian dampak yang dirasakan secara tidak langsung dari sisi mikro adalah perubahan tingkat output, harga produk, harga input dan lain lain. Sedangkan dampak tidak langsung dari sisi makro adalah inflasi, perubahan PDB atau PDRB. (Sholeh M. , 2005).

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan di Indonesia memiliki tingkatan yang berbeda beda setiap provinsi nya, hal ini mengacu pada standar kehidupan layak (KHL) yang disesuaikan setiap tahunnya. Penetapan upah minimum sendiri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup para pekerja nya. Penetapan upah minimum tidak hanya berdampak kepada pendapatan pekerja yang terjamin dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi juga dapat berdampak terhadap tingginya tingkat pengangguran, inflasi, dan juga gaji.

Pendapatan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita setiap provinsi berbeda beda. Provinsi yang memiliki nilai PDRB per kapita di atas 30 juta dikategorikan sebagai provinsi kaya yang relatif berada di pulau jawa. Provinsi yang memiliki nilai PDRB dibawah 30 juta dikategorikan sebagai provinsi miskin yang relatif berada di daerah Indonesia timur. Perbedaan nilai Upah Minimum Provinsi juga kemungkinan akan memiliki dampak yang berbeda beda setiap provinsi baik provinsi miskin maupun provinsi kaya. Perbedaan pengaruh kenaikan upah minimum dapat dilihat dari sisi pengangguran, gaji, dan juga inflasi. Tingginya perubahan tingkat upah minimum yang ditetapkan oleh suatu provinsi dari tahun sebelumnya akan berakibat kepada tingginya tingkat pengangguran, seperti yang terjadi di Provinsi Papua, presentasi perubahan upah minimum dari tahun 2016 ke tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan di Provinsi Jawa, sehingga penambahan angka pengangguran di Provinsi Papua jauh lebih tinggi. Tingginya tingkat upah minimum yang ditetapkan suatu provinsi juga akan berdampak kepada naiknya gaji yang diberikan kepada setiap pekerja, semakin besar upah minimum yang ditetapkan maka gaji yang diberikan akan semakin besar. Tingginya perubahan kenaikan upah minimum juga dapat memicu adanya inflasi hal ini dikarenakan perusahaan dapat merespon kenaikan upah minimum dengan menaikkan harga barang dan jasa yang diproduksi. Sehingga, semakin tinggi perubahan upah minimum yang terjadi di suatu provinsi maka inflasi yang terjadi juga akan semakin besar apabila perusahaan merespon dengan menaikkan harga barang dan jasa yang diproduksi.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, penelitian ini ingin menjawab beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

- Bagaimana Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap gaji, jumlah tenaga kerja, dan juga inflasi di provinsi kaya?
- Bagaimana Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap gaji, jumlah tenaga kerja, dan juga inflasi di provinsi miskin?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) yang digunakan dalam sistem pengupahan di Indonesia baik di provinsi kaya maupun di provinsi miskin terhadap tingkat pengangguran, inflasi, dan juga gaji. Dengan begitu diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan mengenai dampak penetapan upah minimum, agar dapat menguntungkan baik dari sisi pekerja di setiap provinsi nya dan juga pengusaha, yang pada akhirnya dapat menambah Pendapatan Domestik Regional Bruto setiap provinsi.

1.4 Kerangka Pemikiran

Upah minimum adalah bayaran terendah yang harus dibayarkan pengusaha kepada para pekerjanya atas selesainya suatu pekerjaan sebagai bentuk imbalan kepada para pekerjanya. Kenaikan Upah Minimum Provinsi dapat mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang diminta, gaji yang diberikan kepada para pekerjanya, dan dapat memicu inflasi di satu provinsi.

Variabel Upah minimum dapat mempengaruhi tenaga kerja dari sisi pengangguran dan juga jumlah jam kerja. Kenaikan upah minimum provinsi dapat mempengaruhi jumlah pengangguran, di suatu provinsi. Perusahaan akan merespon kenaikan upah minimum dengan mengurangi jumlah biaya yang dikeluarkan dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja, sehingga angka pengangguran di suatu provinsi akan meningkat. Selain itu perusahaan hanya akan mempertahankan tenaga kerja dengan suatu standar tertentu yang dibayarkan dengan upah minimum. Hal yang diutamakan adalah standar pendidikan, sehingga pekerja yang tidak memiliki standar tersebut tidak akan mendapatkan pekerjaan (Wirawan, 2015, pp. 394 - 395). Variabel inflasi juga dapat mempengaruhi secara negatif jumlah pengangguran di suatu provinsi artinya ketika inflasi mengalami kenaikan maka jumlah pengangguran akan berkurang, begitu juga sebaliknya ketika inflasi mengalami penurunan maka jumlah pengangguran akan mengalami peningkatan, meskipun hubungan negatif tersebut terjadi hanya dalam jangka pendek. Dalam jangka Panjang infasi dapat meningkatkan pengangguran, karena inflasi yang berkepanjangan dapat mengurangi daya beli masyarakat, Hilangnya daya beli masyarakat membuat keuntungan perusahaan berkurang, maka perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja mereka. (Investopedia, 2020).

Kenaikan upah minimum juga dapat mempengaruhi pekerja dari sisi jumlah jam kerja. Ketika terjadi kenaikan Upah Minimum perusahaan memilih mempekerjakan pekerja yang memiliki keterampilan tinggi dengan jumlah pekerja yang lebih sedikit tetapi dengan menambah jam kerja kepada para pekerjanya. Perusahaan berfikir

ketika mempekerjakan pekerja dengan keterampilan tinggi mereka akan lebih produktif dan bekerja lebih lama, tetapi ketika perusahaan memilih untuk mempekerjakan pekerja dengan keterampilan lebih rendah maka jam kerja akan lebih sedikit tetapi jumlah pekerja yang dibutuhkan akan lebih banyak. (Zavodny, 2000). Perubahan jam kerja juga dapat dipengaruhi oleh inflasi. Sem

Makin tinggi inflasi di suatu provinsi maka upah yang diberikan akan semakin tinggi. Dalam jangka pendek ketika terjadi kenaikan upah karena adanya kenaikan inflasi, perusahaan terkadang lebih memilih mengurangi jam kerja pekerjanya dibandingkan harus memecat kemudian merekrut karyawan baru, hal ini dikarenakan akan menambah biaya lebih banyak untuk perekrutan kemudian pelatihan para pekerja.

Variabel Upah Minimum Provinsi juga dapat mempengaruhi gaji, hal ini dikarenakan ketika upah minimum meningkat maka perusahaan akan membayar atau memberikan gaji sesuai dengan upah minimum yang baru. Kenaikan gaji dirasakan bukan hanya bagi pekerja yang digaji sesuai dengan Upah Minimum tetapi juga pekerja yang digaji dengan nilai di atas Upah Minimum. Variabel gaji juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya inflasi pada suatu provinsi. Pemerintah dalam menetapkan upah minimum selalu memperhitungkan tingkat inflasi di suatu daerah. Semakin tinggi tingkat inflasi maka gaji yang diberikan juga akan semakin tinggi karena gaji yang diberikan harus dapat menutupi biaya kebutuhan hidup para pekerjanya. (Gadjian, 2019). Tetapi perubahan variabel gaji juga dipengaruhi oleh banyaknya pengangguran di suatu provinsi atau daerah. Semakin banyak jumlah pengangguran, artinya perusahaan memiliki daya tawar yang tinggi, sehingga upah cenderung lebih rendah.

Kenaikan upah minimum juga dapat memicu terjadinya inflasi. Kenaikan upah minimum dapat di respon oleh perusahaan dengan cara mengurangi jumlah lapangan pekerjaan atau dengan menaikkan biaya produksi yang nantinya akan diikuti dengan naiknya harga barang yang dijual. Kenaikan harga barang yang dijual dapat menyebabkan kenaikan inflasi. Naiknya harga barang yang dijual oleh perusahaan dilakukan untuk menutupi kenaikan upah minimum. (Lemos, 2004). Perubahan variabel inflasi juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya produktivitas pekerja. Nilai produktivitas sendiri didapat dari pembagian input (jumlah pekerja) dan output yang dihasilkan seluruh industri dalam suatu Provinsi. Jika produktivitas di suatu industri mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada akhirnya dapat menyebar ke seluruh perekonomian, meskipun tidak harus sangat merata. Semakin cepat peningkatan produktivitas secara keseluruhan, maka kenaikan produktivitas ini dapat mempengaruhi harga di industri yang memiliki produktivitas rendah. Kenaikan harga di

beberapa output di beberapa industri dapat memicu terjadinya kenaikan inflasi. (JOC, 1998)

GAMBAR 1. KERANGKA PEMIKIRAN

